

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak merdeka pada tahun 1991, Kazakhstan terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa titik dalam sejarah politik Kazakhstan meliputi transisi ke demokrasi, otoritarianisme oligarki, pemilu dan kekuasaan presiden, dan otonomi lokal. Berikut adalah beberapa pointnya Kazakhstan mengalami transisi menuju demokrasi sejak awal 1990-an, setelah tanggal 26 Desember 1991, Negara tersebut melepaskan diri dari Uni Soviet. Namun, transisi jelas tidak berjalan dengan mulus, dan negara ditandai oleh dominasi presiden dan kurangnya hak untuk berpendapat dan kebebasan pers. Otoritarianisme oligarki politik merupakan ciri politik Kazakhstan sejak merdeka. Mantan politbiro Partai Komunis Soviet, Presiden Nursultan Nazarbayev menetapkan kaki pada 1991 dan memegang kekuasaan hingga 2019 Maret. Presiden Nazarbayev menggunakan kebijakan untuk memperkuat posisinya dan menguasai koalisi oligarki politik yang tak tertandingi.

Pemilihan dan Kepemimpinan Presiden. Pemilihan di Kazakhstan hanya menghasilkan penguatan kekuatan Presiden Nursultan dengan koalisi oligarki politiknya. Pada Maret 2019, Nazarbayev mengundurkan diri dan digantikan oleh Kassym-Jomart Tokayev, Ketua Senat. Tokayev, dari segi karakter, tidak memiliki karisma dan sikap yang sama seperti yang dulu dimiliki Nazarbayev dan dengan

demikian warga berani melakukan pembangkangan besar-besaran. Krisis politik di Kazakhstan terjadi pada tahun 2022 ketika rapat umum massa bertemu dengan ribuan polisi, personel militer, dan dengan bantuan militer Rusia. Setidaknya 164 warga sipil dan 18 petugas penegak hukum di negara itu tewas. Hubungan diplomatik Kazakhstan dengan Rusia telah berubah. Yang pertama telah menghadapi sanksi ekonomi dari Rusia pada tahun 2014 karena aneksasi Krimea dan banyak negara di Asia Tengah menghadapinya dan ekonomi mereka tenggelam. Hal ini membuat Kazakhstan mengalami dilema dalam menjaga hubungan dengan Rusia sementara ingin mencari peluang menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menjaga stabilitas negara dan dunia.

Kebijakan luar negeri Kazakhstan yang aktif meliputi beberapa strategi yang digunakan oleh negara dalam menghadapi situasi geopolitik yang kompleks. Kazakhstan mengembangkan kebijakan luar negeri yang disebut “multi-vector policy” yang berfokus pada pengembangan relasi dengan beberapa negara besar, termasuk Rusia, serta berbagai organisasi internasional. Kebijakan luar negeri bertujuan untuk mempertahankan kestabilan geopolitik dan keamanan regional. Meskipun Kazakhstan memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia, Kazakhtan terus menjalankan kerjasama dengan Rusia dalam berbagai bidang, termasuk energi dan infrastruktur. Kebijakan ini membantu Kazakhstan dalam meningkatkan stabilitas geopolitik. Lalu Kazakhstan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kemampuan eksekutif proyek lainnya. Dengan

adanya kebijakan ini, Kazakhstan dapat meningkatkan daya saing global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kazakhstan terus melakukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing. Kebijakan meliputi privatisasi, pengembangan sektor pertanian, dan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan.

Persaingan Amerika Serikat dengan Rusia adalah isu global yang kompleks dan berlangsung sejak berakhirnya perang dingin. Persaingan ideologi, politik, militer, dan ekonomi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet telah menciptakan ketegangan yang intens. Ketegangan berlanjut setelah Uni Soviet runtuh dan Rusia menggantikannya sebagai kekuatan utama. Amerika Serikat dan Rusia sering berkompetisi dalam wilayah dan konflik regional, seperti di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Persaingan kepentingan di wilayah-wilayah tersebut menyebabkan ketegangan dan konfrontasi. Amerika Serikat sering mengecam pelanggaran hak asasi manusia(HAM) dan kurangnya kebebasan politik di Rusia. Sebaliknya, Rusia mempertahankan sistem politiknya yang otoriter dan menolak kritik Amerika Serikat terhadapnya. Kedua negara telah melakukan intervensi militer dalam konflik regional, seperti di Suriah. Amerika Serikat telah memperjuangkan hak asasi masyarakat Suriah dan menjaga sistem perekonomian kawasan Timur Tengah agar tetap stabil, sementara Rusia membangun pangkalan udara di Hmeimim dan mempertahankan pelabuhan Tartus sebagai basis mediterania. Amerika Serikat dan Rusia memiliki kepentingan wilayah

yang berbeda, seperti di Laut Arktik. Rusia menggencarkan peran militernya di Laut Arktik untuk mengontrol keamanan wilayah utara yang memiliki perbatasan Laut Arktik terpanjang di dunia.

Pengaruh Amerika Serikat dan Rusia terhadap Kazakhstan dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk geopolitik, strategis, dan ekonomi. Kazakhstan telah bergabung dengan NATO demi perdamaian, menjadikan negara tersebut sebagai sekutu terbesar Amerika Serikat di Asia Tengah. Kazakhstan memiliki perbatasan langsung dengan Laut Kaspia, yang mengandung cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Amerika Serikat berupaya memperkuat hubungan dengan Kazakhstan karena posisi geostrategis dan kekayaan sumber daya alamnya. Kazakhstan juga memiliki kerjasama dengan Rusia, seperti pembangunan jalur pipa gas utama baru yang melalui Laut Kaspia, serta kerjasama dengan Turkmenistan untuk membangun jalur pipa minyak. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menjadi investor utama dalam industri minyak dan gas di Kazakhstan, dengan Kazakhstan memberikan keistimewaan untuk menanamkan investasi dalam bidang perminyakan dan gas. Kazakhstan memiliki kekayaan minyak yang mencapai 150 triliun meter kubik, menjadikan negara tersebut sangat penting bagi Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan energi. Rusia telah mengadakan kerjasama dalam Shanghai Cooperation Organization(SCO) untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Asia Tengah dan mengawasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Rusia juga berupaya untuk menghindarkan kawasan Asia Tengah, termasuk Laut Kaspia, dari pengaruh Amerika

Serikat, karena Rusia khawatir jika kawasan tersebut tidak dibendung, maka Amerika Serikat akan memiliki kekuatan dan aset besar yang dapat mengancam keamanan Rusia.

Konflik Rusia Ukraina adalah konflik yang kompleks dan berlangsung sejak 2014. Konflik dimulai dengan pengambilalihan Crimea oleh Rusia dan kemudian pecah menjadi perang di timur Ukraina. Pada tahun 2022, Rusia meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina, yang menyebabkan kematian lebih dari 30.000 warga sipil dan 6,5 juta orang mengungsi ke luar negeri. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan humaniter sebesar 278 miliar USD kepada Ukraina sejak Januari 2022, termasuk 75 miliar USD dari Amerika Serikat sendiri. Bantuan termasuk senjata modern, seperti sistem pertahanan udara patriot, dan tank perang tingkat tinggi. Amerika Serikat juga telah meningkatkan kehadiran pasukannya di Eropa, mencapai lebih dari 100 ribu personel.

Pengaruh konflik tidak hanya terbatas pada Ukraina dan Rusia, tetapi juga memiliki implikasi global. Kekalahan di Ukraina dapat menyebabkan destabilisasi Eropa, yang dimana memiliki konsekuensi ekonomi dan keamanan yang signifikan bagi Amerika Serikat. Peperangan yang terjadi di Eropa dapat membuat Amerika Serikat lebih buruk baik secara ekonomi maupun politik. Konflik juga terkait dengan strategi geopolitik Amerika Serikat dan NATO. Amerika Serikat-NATO berusaha mempertahankan status quo di kawasan Euro-Arktik dan mengantisipasi ekspansi Cina ke Eropa. Oleh karena itu, Amerika Serikat-NATO menggunakan konsep balancing

untuk melihat bagaimana mereka dapat membentuk persepsi ancaman terhadap cina dna mengembangkan strategi detensi dan pengawasan untuk menghentikan ekspansi Cina di kawasan tersebut.

Kazakhstan memiliki posisi yang rumit dalam konflik Rusia-Ukraina, Kazakhstan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia, karena keduanya pernah jadi bagian dari Uni Soviet. Kazakhstan berbatasan secara langsung dengan Rusia di utara dan barat, serta memiliki minoritas etnis Rusia yang signifikan, yaitu sekitar 19 persen dari total 19 juta penduduk. Kazakhstan dan Rusia memiliki kerjasama militer yang luas, termasuk pendidikan militer, pembelian senjata dan amunisi, serta kerjasama teknis dan pembentukan kekuatan kolektif. Mereka juga memiliki perjanjian tentang kerjasama militer, pengembangan kerjasama, dan pembentukan sistem pertahanan udara regional terpadu. Kazakhstan secara implisit tidak menyetujui invasi Rusia ke Ukraina. Banyak kalangan di Kazakhstan merasa Rusia dapat menggunakan alasan etnis minoritas Rusia untuk berbuat jauh di Kazakhstan. Kazakhstan juga mencermati dinamika perang di Ukraina dan beberapa hari setelah invasi Rusia, beberapa orang berdemonstrasi di Lapangan Sukhbaatar di Ulaanbaatar untuk menyerukan agar perang Rusia-Ukraina segera diakhiri. Kazakhstan memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan dengan Rusia, karena sebagian besar ekspor minyak Kazakhstan disalurkan melalui Rusia. Hal ini membuat situasi yang dilema bagi Kazakhstan, yang harus mempertahankan hubungan dengan Rusia sementara juga menunjukkan solidaritas dengan Ukraina. Kazakhstan adalah

anggota organisasi Eurasian Economic Union(EaEU), yang diikuti oleh Rusia, Belarus, Armenia, dan Kirgistan. Mereka menganggap EaEU merupakan pakta geopolitik yang melanggengkan dominasi Rusia, bukan liberalisasi perdagangan seperti terjadi di Uni Eropa. Kazakhstan juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, menunjukkan solidaritas dengan Ukraina dalam konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan masalah yaitu mengapa Kazakhstan menerapkan kebijakan luar negeri aktif dalam pengolaan hubungan antara amerikat serikat dan rusia melalui pendekatan strategi middle power?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis strategi Kazakhstan dalam pengelolaan hubungan trilateral antara Amerika Serikat dan Rusia.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menjelaskan tindakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kazakhstan guna mengelola hubungan kerjasama dan diplomasi antara Amerika Serikat dan Rusia.

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat pemerintah Kazakhstan menerapkan konsep middle power dan relational power guna mengelola hubungan trilateral.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan mampu menambah pemahaman tentang strategi middle power Kazakhstan dan perannya dalam mengelola hubungan kerjasama dan diplomasi dengan negara-negara great power. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan luar negeri Kazakhstan dapat mempengaruhi stabilitas negaranya. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang konsep middle power dan implementasinya di Kazakhstan. Penelitian menunjukkan bagaimana kerangka konsep middle power dapat digunakan untuk menganalisis peran Pemerintah Kazakhstan dalam konteks pengelolaan hubungan trilateral.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan mampu memberikan panduan bagi Pemerintah Kazakhstan dalam mengelola hubungan kerjasama dan diplomasi. Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan taktik yang lebih efektif untuk Pemerintah Kazakhstan. Penelitian pula dimaksudkan guna meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang pentingnya strategi diplomasi guna menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia internasional.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kazakhtan merupakan negara dengan perekonomian yang paling stabil dan kuat di anatar negara Asia Tengah. Dengan lokasi yang strategis membuat Kazakhtan memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kekuatan politik global. Salah satu bentuk nyata bentuk kekuatan Kazakhtan tercermin pada pembangunan China Silk Road Economic Belt. Proyek menghandirkan dilemma bagi masyarakat kazakhtan, melalui proyek tersebut Kazakhtan tentu akan mendapatkan keuntungan dalam hal investasi dan juga pembukaan lapangan pekerjaan yang sangat berguna bagi rakyat Kazakhtan. Disisi lain, ketidak transparanan proyek juga menimbulkan keraguan atas Tiongkok dan juga kerugian dalam sektor pertanian sebagai konsekuensi kehilangan lahan akibat pembangunan proyek (Nargis Kassenova, 2018).

Tiongkok sendiri menganggap bahwa Kawasan Asia Tengah merupakan wilayah potensial dalam membangun jalan tol internasional. Kebijakan Kazakhstan mengenai Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok ditandai dengan perpaduan kerja sama dan kehati-hatian. Meskipun Kazakhstan telah memperoleh manfaat dari investasi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan melalui BRI, terdapat kekhawatiran mengenai potensi risiko dan implikasi jangka panjang dari keterlibatan Kazakhstan dengan Tiongkok.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kedua Kazakhstan, dan kedua negara telah aktif terlibat dalam kerja sama kapasitas produksi dan investasi, dengan daftar 52 proyek bernilai lebih dari \$21,2 miliar (Xinhua, 2023). Walaupun terdapat kekhawatiran mengenai potensi risiko yang terkait dengan hubungan dekat Kazakhstan dengan Tiongkok, termasuk dominasi perusahaan Tiongkok di sektor-sektor utama, potensi ketergantungan ekonomi, dan dampaknya terhadap kedaulatan Kazakhstan (Corre, 2018). Oleh karena itu, Kazakhstan berupaya mendiversifikasi hubungan ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok dengan menjajaki peluang dengan negara-negara besar lainnya seperti Rusia dan Amerika Serikat (Corre, 2018).

Walaupun begitu Tiongkok dan Kazakhstan tetap memelihara kemitraan strategis yang berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan melalui Belt and Road (Skalamera, 2018). Kemitraan sudah mengikat Perjanjian antara Perusahaan Kereta Api Negara Temir Zholy dari Kazakhstan dan CRRC Corporation Limited dari Tiongkok sebesar 1,3 miliar USD untuk membeli 200 lokomotif diesel shunting dan jalur utama dan untuk mendirikan pusat teknik dan layanan di Kazakhstan (Xinhua, 2023).

Sejak merdeka pada 1991, Kazakhtan telah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat yang dalam penulisan ini akan disebut dengan AS. Hubungan bermula dari AS yang ingin melindungi Kazakhtan dalam upaya mereka untuk melawan pengaruh dari Uni Soviet. Dalam 20 tahun, hubungan AS dan Kazakhtan tidak pernah mengalami-

konflik berarti. Kazakhtan sendiri merupakan negara terkaya di Asia Tengah, potensi ini membuat hubungan bilateral kedua negara merupakan asset yang sangat penting dan saling menguntungkan. Hubungan ini juga terdapat kerja sama yang berkelanjutan antara kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk non-proliferasi nuklir, pembangunan ekonomi, dan ekstraksi energi. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kedua negara tersebut mulai dipenuhi oleh perbedaan karakteristik sehingga sering dijuluki sebagai hubungan yang penuh ambiguitas (Roberts, 2012).

Perkembangan demokrasi membuat kedua negara menaruh rasa curiga. Dalam pandangan AS, Kazakhtan kurang menerapkan sistem demokrasi dan menghargai hak asasi manusia. Disisi lain, Kazakhtan menganggap bahwa kedekatan hubungan mereka sebagai langkah AS dalam mempromosikan demokrasi di negaranya yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang mereka yakini (Khan & Siraj, 2021).

Kesepakatan awal antara Chevron dan Kazakhstan pada awal tahun 1992 memberikan hak eksplorasi yang signifikan kepada perusahaan AS yang paling terkenal di Kazakhstan.

Farm Kaspia di Tengiz Kemitraan baru dari kemitraan sebelumnya AS-Kazakhstan dalam bidang minyak ekstraksi dianggap sebagai peristiwa penting dalam hubungan bilateral ini mirip dengan kolaborasi non-proliferasi. Tetapi kedua pengalaman itu sangat berbeda dan sangat berharga.

Perundingan Chevron tidak transparan karena lebih terkait dengan dunia bisnis internasional yang tertutup tentang ekstraksi sumber daya alam. Hal tersebut terjadi bahkan jika kerja sama tersebut bertujuan untuk menghilangkan bahan senjata berbahaya yang tersembunyi dalam rahasia keamanan nasional. Misalnya, orang Amerika James Giffen, seorang negosiator bisnis dengan etika yang dipertanyakan, yang telah diadili namun tidak berhasil atas tuduhan melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS.

Pada saat yang sama, Chevron dianggap lebih baik dari kesepakatan dengan Kazakh daripada Tengiz, bahkan dengan bantuan Giffen sebagai negosiator. Akibatnya, Kazakhstan sering menegaskan kembali haknya atas perjanjian tersebut, menegosiasikan kembali syarat-syarat perjanjian, dan mencari cara lain untuk mendapatkan sumber daya Chevron.

Dengan kata lain, meskipun pekerjaan Chevron di Kazakhstan sangat penting bagi AS karena hubungan bilateralnya, itu telah menjadi perdebatan masalah yang kadang-kadang menyebabkan ketegangan antara kedua negara (Khan & Siraj, 2021).

Banyak hal telah diubah oleh serangan teroris 11 September 2001 yang mengubah hubungan AS-Kazakhstan. seperti halnya dengan negara-negara di luar Amerika Serikat

Setelah tahun 2001, kebijakan AS di seluruh Central Asia berkonsentrasi pada masalah keamanan dan perang global melawan terorisme. Setelah membangun

hubungan militer dan keamanan yang kuat dengan Kazakhstan, Amerika Serikat dengan cepat mencari dukungan dari Kazakhstan dan negara tetangganya di Asia Tengah untuk memimpin perang dan upaya rekonstruksi AS di Afghanistan (Roberts, 2012). Hubungan menandakan betapa eratnyanya AS dan Kazakhtan.

Hubungan bilateral Kazakhstan-AS sangat penting setelah dua dekade kerja sama yang menguntungkan dan produktif., walaupun memiliki keterbatasan bagi masing-masing negara. Amerika Serikat gagal mempromosikan Kazakhstan sebagai sekutu dekat, mengingat prestasi Kazakhstan dalam reformasi demokrasi dan hak asasi manusia. Kazakhstan juga tidak seerta merta tidak mempertahankan aliansinya dengan AS ditengah kekhawatiran AS terhadap sistem politiknya. Hubungan tersebut juga akan bertahan lama mengingat Kazakhtan merupakan negara kuat di Asia Tengah dan AS membutuhkan sekutu dalam menahan gempuran Rusia dan Tiongkok (Townsend, 2020).

Kepentingan geopolitik Rusia telah berubah sejak Perang Dingin berakhir, dan Kremlin masih menyesuaikan persepsinya terhadap kancah internasional. Kebijakan luar negeri Rusia yang ambivalen terlihat di Asia Tengah karena tantangan Moskow di sana sangat kompleks. Pada awalnya, Rusia tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan Asia Tengah. Pandangan Rusia sebagai sebuah kerajaan dikecam karena mengalihkan Rusia dari jalur Eropa, yang bertentangan dengan keinginan Moskow untuk mempertahankan kendali atas Asia Tengah.

Ketika Rusia kehilangan sumber daya dan pengaruh internasional, Boris Yeltsin mencoba menghidupkan kembali status kekuatan besar Rusia dan memperkuat hubungan dengan Barat serta Asia Tengah. Rusia juga mulai mengamati situasi di perbatasan selatannya yang memburuk. Peristiwa 11 September mendorong Rusia untuk terlibat lebih aktif di Asia Tengah, terutama karena kehadiran militer AS di Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Menjadi pendorong Kremlin untuk meningkatkan ambisi di wilayah tersebut (Sébastien Peyrouse, 2019).

Sejarah Rusia mempengaruhi definisi strategi Kremlin. Persepsi keamanan global Rusia berkembang pada tahun 2000an. Moskow akan menyesuaikan pandangannya terhadap Asia Tengah. Rusia harus menghadapi tantangan domestik dan internasional di masa depan. Keamanan menjadi faktor penting dalam keterlibatan Rusia di Asia Tengah. Meskipun hanya Kazakhstan yang berbatasan dengan Rusia, Moskow melihat perbatasan selatan sebagai masalah keamanan dalam negeri. Moskow menganggap Asia Tengah sebagai zona penyangga dengan ancaman non-tradisional yang meningkat.

Sejak tahun 1990-an, Rusia telah berkerjasama dalam latihan militer dengan beberapa negara di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Meskipun tidak ada pasukan Rusia di Turkmenistan, Kyrgyzstan, atau Tajikistan, konsultasi bilateral masih berlangsung terkait sekuritisasi perbatasan. Rusia juga telah melakukan operasi gabungan dengan Kazakhstan terkait perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Layanan perbatasan FSB memberikan bantuan teknis di Kyrgyzstan dan

Tajikistan, sementara Rusia terus melatih personel angkatan udara mereka (Sébastien Peyrouse, 2019).

Kazakhstan sendiri merupakan bagian dari Republik Sosialis Soviet selama 70 tahun, dari 1920 hingga keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Hal tersebut meninggalkan warisan budaya, bahasa, dan infrastruktur yang terhubung erat dengan Rusia. Dengan jarak perbatasan sepanjang 7.600 km, menjadikannya tetangga terdekat bagi Kazakhtan (Martha & Olcott, 2007). Memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, Kazakhtan berperan aktif dalam menjaga hubungan dengan berbagai negara. Hal tersebut juga yang menjadikan hubungan bilateral antara Rusia dan Kazakhtan sama halnya dengan hubungan AS dengan Kazakhtan. Rusia dan Kazakhstan memiliki hubungan yang erat di berbagai bidang, seperti Politik, dimana Kedua negara merupakan anggota Organisasi Keamanan Kolektif (CSTO) dan Organisasi Kerjasama Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union). Dalam Ekonomi, Rusia merupakan mitra dagang utama Kazakhstan, dengan fokus pada sektor energi, industri, dan pertanian. Tak hanya itu, dalam sector Pertahanan Rusia dan Kazakhstan menjalin kerja sama militer yang erat, termasuk latihan bersama dan modernisasi angkatan bersenjata Kazakhstan. Selain itu, terdapat pertukaran budaya yang aktif antara kedua negara, dengan banyaknya warga Kazakhstan yang berbahasa Rusia dan memiliki keturunan Rusia (ROUSSEAU., 2011).

Hubungan kedua negara tersebut mendapatkan ujian pasca invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Kazakhstan mempertahankan posisi netralnya dalam konflik

tersebut, dan tidak mendukung tindakan Rusia. Kazakhstan tidak ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia terkait invasi ke Ukraina. Alasannya berfokus pada kepentingan ekonomi nasional dan menghindari dampak negatif bagi rakyatnya. Meskipun tidak menjatuhkan sanksi, Kazakhstan memastikan wilayahnya tidak digunakan untuk menghindari sanksi yang berlaku. Meskipun demikian, kedua negara terus menjalin kerja sama di berbagai bidang, dengan fokus pada kepentingan nasional masing-masing (Mikovic, 2023).

Melalui hal tersebut, dapat membuktikan bahwasanya Kazakhstan memprioritaskan kebijakan luar negeri yang independen dan seimbang. Kazakhstan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara, termasuk Rusia dan China. Kebijakan Kazakhstan terkait Rusia dapat menimbulkan dilema, karena harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam memahami strategi kebijakan luar negeri Kazakhstan dalam mengelola hubungan trilateral antara Amerika Serikat dan Rusia, diperlukan landasan konseptual dan teoritis yang solid. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menggabungkan konsep middle power, relational power, dan balance of identity untuk menjelaskan dinamika strategi yang diterapkan Kazakhstan. Untuk itu, kerangka pemikiran dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu kerangka konseptual dan kerangka teoritis.

1.6.1 Kerangka Konseptual

Konsep *middle power* merupakan pendekatan diplomasi yang dijalankan oleh negara-negara yang tidak memiliki kekuatan besar secara militer, ekonomi, ataupun populasi, tetapi mampu memainkan peran penting dalam arena internasional melalui kolaborasi dan diplomasi yang aktif. Menurut Jordaan (2003), *middle power* berada di antara kekuatan besar dan *small power*. Dalam studi Hubungan Internasional, konsep ini memperlihatkan bagaimana negara dengan keterbatasan tertentu tetap mampu memberikan pengaruh pada dinamika politik global. Konsep tersebut sering dimaknai sebagai upaya negara *middle power* untuk memainkan peran sebagai *bridge-builder* atau jembatan di antara kepentingan negara-negara besar.

(Lee, 2015) menekankan bahwa peran *middle power* dalam sistem internasional menciptakan dinamika baru dalam relasi antarnegara karena negara tersebut mampu membangun aliansi atau mendorong kebijakan multilateral meski tidak memiliki kekuatan militer dominan. Dalam konteks ini, strategi *middle power* bukan sekadar posisi geografis atau kekuatan materiil, melainkan bagaimana negara mampu menciptakan ruang pengaruh melalui narasi diplomasi dan kebijakan luar negeri yang adaptif.

Dalam konteks globalisasi dan kompetisi geopolitik yang semakin kompleks, *middle power* tidak lagi dipandang sebagai aktor pasif atau sekadar pengikut dari kebijakan negara besar. Negara-negara tersebut kini menunjukkan inisiatif dalam

membentuk arsitektur regional, memperkuat institusi multilateral, hingga menjadi mediator konflik. Keberadaan Kazakhstan sebagai middle power ditopang oleh kemampuan negara ini dalam memainkan kebijakan luar negeri yang tidak hanya responsif terhadap tekanan eksternal, tetapi juga proaktif dalam menciptakan peluang kerjasama lintas blok kekuasaan. Tercermin dari kebijakan multi-vektor yang fleksibel, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, mulai dari Shanghai Cooperation Organization (SCO), Eurasian Economic Union (EAEU), hingga kerjasama strategis dengan Amerika Serikat.

Kekuatan Kazakhstan sebagai middle power juga terlihat dari bagaimana negara ini mengelola identitas nasionalnya sebagai bagian dari Asia Tengah yang memiliki akar Soviet, tetapi juga mengembangkan hubungan yang erat dengan dunia Barat dan Timur. Identitas ganda ini justru menjadi modal sosial-politik yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kazakhstan untuk menciptakan posisi tawar strategis di mata dunia. Pendekatan Kazakhstan ini menjadi contoh nyata dari kemampuan middle power untuk memainkan strategi politik identitas dalam kerangka hubungan internasional, tanpa harus terjebak dalam polaritas geopolitik yang ekstrem.

1.6.2 Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis strategi Kazakhstan dalam mengelola hubungan trilateral dengan Amerika Serikat dan Rusia, penelitian ini menggunakan tiga teori utama: *Middle Power*, *Relational Power*, dan *Balance of Identity*. Teori *Middle Power*

membantu menjelaskan bagaimana Kazakhstan memanfaatkan posisi menengahnya dalam tatanan dunia. Bukan dengan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi melalui strategi diplomasi aktif dan kemampuan menjembatani kepentingan negara-negara besar.

Sementara itu, teori *Relational Power* memandang kekuatan tidak semata-mata berasal dari kemampuan materi, tetapi dari relasi dan persepsi yang dibangun dalam hubungan antarnegara. Kazakhstan dengan sengaja membentuk citra sebagai mitra yang dapat dipercaya oleh baik Amerika Serikat maupun Rusia. Relasi ini dibangun melalui keselarasan kepentingan, dukungan politik, dan hubungan ekonomi jangka panjang. Kazakhstan memilih untuk membina kedekatan tanpa memihak secara mutlak, menjadikannya memiliki posisi tawar yang unik.

Ketiga pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini saling melengkapi dan membentuk lensa analisis yang kuat untuk melihat strategi Kazakhstan. *Middle power* menjelaskan basis struktur peran; *relational power* memberi makna atas proses diplomatik dan jaringan relasi yang dibangun Kazakhstan; sementara *balance of identity* menjelaskan dimensi kultural dan simbolik yang digunakan dalam menjaga stabilitas relasi trilateral. Dengan memadukan ketiga teori ini, peneliti dapat memahami secara lebih holistik bagaimana strategi diplomasi Kazakhstan tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga strategis dan reflektif terhadap dinamika politik internasional kontemporer.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, penulis beranggapan bahwa stabilnya hubungan trilateral Kazakhstan antara Amerika Serikat dan Rusia dikarenakan pengelolaan hubungan kerjasama Kazakhstan menggunakan strategi middle power yang bersifat netral sehingga relasi Kazkhstan terhadap Amerika Serikat dan Rusia tetap terjalin. Dengan demikian dapat disusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut;

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Konsep *Middle Power*

Konsep middle power adalah pendekatan diplomasi yang di gunakan oleh negara-negara yang tidak memiliki kekuatan ekonomi, militer, atau populasi yang signifikan, namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda internasional melalui kerja sama dan diplomasi yang efektif. Middle power sendiri berada di bawah tingkatan negara besar namun diatas negara small power (Jordaan,2003). Dalam studi HI, konsep middle power sendiri membahas bagaimana negara yang masuk dalam klasifikasi tersebut memiliki implikasi yang cukup berarti pada politik global dan terhadap posisi negara maju dengan kekuatan yang lebih besar (Lee, 2015). Konsep middle power ini dalam literatur sering dijelaskan sebagai suatu rencana alternatif yang membuka dirinya di tengah adanya sistem internasional yang terdominasi oleh kekuatan besaar yang masih bertahan hingga perang dingin selesai, dan bagaimana aktivitas diplomasi para negara middle power ini dapat memberikan perspektif bottom up baru dalam HI di tengah perdebatan mengenai hierarki global (Cooper A. , 1997).

Konsep middle power juga berfokus pada aktivitas suatu negara dalam HI terus ditingkatkan sehingga aktivisme mereka mampu memberikan pengaruh walaupun mengalami keterbatasan(constraint) dalam strategi maupun opsi kebijakan luar negerinya (Ravenhill, 1998).

1.7.1.2 Konsep *Relational Power*

Relational Power sebagai kekuatan yang berasal dari afektif hubungan antara agen (pemimpin) dan target (Shang et al., 2012). Hubungan itu melibatkan perasaan atau ganqing dalam Bahasa Cina, sebuah hal yang penting dalam guanxi (Chen & Chen, 2004). Sebagai istilah khusus, Relational Power pertama muncul di Harvard Business Essentials (2005). Dalam bab buku, “ Power Sources,” Relational Power , didefinisikan sebagai “kekuatan informal yang berasal dari hubungan Anda dengan yang lain,” dibahas bersama dengan posisi dan kekuatan pribadi. Chapter tersebut memperkenalkan Relational Power dari sudut pandang praktis dengan contoh-contoh yang menunjukkan keberadaan di tempat kerja. Kami menemukan chapter ini menginspirasi karenan menunjukkan bahwa hubungan memang bisa diperlakukan sebagai semacam power (Shang et al., 2012). Kemudian, Fu et al. (2008) menyarankan bahwa Relational Power dapat berfungsi sebagai potensi basis kekuatan dan mendiskusikan dampak potensial dari setiap basis kekuatan (position, persona, dan relational) pada strategi pengaruh yang berbeda.

1.7.1.3 Konsep *Balance of Identity*

Dalam studi hubungan internasional, *Balance of Identity* merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya negara dalam menjaga keseimbangan antara identitas nasional yang dimilikinya dengan ekspektasi dan persepsi dari aktor-aktor internasional lainnya. Teori ini merupakan bagian dari pendekatan konstruktivis yang melihat bahwa hubungan internasional tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan material dan struktur kekuasaan, tetapi juga oleh bagaimana identitas dikonstruksi dan dinegosiasikan oleh negara dalam arena global (Abdelal et al., 2006).

Konsep ini menunjukkan bahwa negara dapat mengelola peran dan posisinya dalam tatanan internasional dengan cara menciptakan narasi identitas yang fleksibel, adaptif, dan kontekstual terhadap berbagai kepentingan eksternal. Dalam konteks ini, identitas tidak dilihat sebagai sesuatu yang tetap, melainkan sebagai hasil dari interaksi sosial-politik antara negara dan lingkungannya. Hal ini memungkinkan negara untuk memelihara stabilitas hubungan luar negeri sekaligus menjaga legitimasi domestik (Hopf, 2002).

Negara-negara seperti Kazakhstan, yang berada di antara dua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, menggunakan strategi *balance of identity* untuk membentuk citra dirinya sebagai aktor yang netral, kredibel, dan adaptif. Dengan menyesuaikan representasi identitas tergantung pada mitra strategisnya, Kazakhstan dapat menjaga hubungan baik dengan berbagai aktor besar tanpa kehilangan jati

dirinya. Strategi ini sangat relevan dalam konteks multi-vector foreign policy yang dijalankan Kazakhstan (Tsygankov, 2010).

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Konsep *Middle Power*

Konsep *middle power* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai konsep atau strategi yang digunakan Kazakhstan dalam mengelola hubungannya dengan Amerika Serikat dan Rusia, Kazakhstan tidak memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan tetapi Kazakhstan dapat mempengaruhi agenda internasional melalui kerjasama dan diplomasi yang dijalin dengan Amerika Serikat dan Rusia, langkah yang dilakukan Kazakhstan menunjukkan bahwa konsep *middle power* sangatlah efektif untuk menjalin hubungan dengan negara-negara *great power*.

1.7.2.2 Konsep *Relational Power*

Konsep *relational power* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep *relational power* yang diterapkan oleh Kazakhstan guna mengelola hubungan trilateral antara Amerika Serikat dan Rusia, konsep ini digunakan sebagai landasan Kazakhstan sebagaimana Kazakhstan menangani atau menghadapi konflik Ukraina-Rusia yang secara tidak langsung melibatkan Amerika Serikat, Kazakhstan bersifat netral dalam konflik tersebut bahkan dapat dikatakan pro terhadap keduanya sehingga hubungan kerjasama dan diplomasi yang dijalin Kazakhstan dengan Amerika Serikat dan Rusia tidak terputus.

1.7.2.3 Konsep *Balance of Identity*

Strategi multivektor Kazakhstan tidak hanya merupakan respon rasional terhadap tekanan geopolitik, tetapi juga merupakan sarana ekspresi identitas negara. Dengan menggunakan strategi *balance of identity*, Kazakhstan dapat memodifikasi penekanan identitasnya agar sesuai dengan mitra strategis yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan multivektor Kazakhstan bertumpu pada kemampuan mengelola dinamika identitas yang kompleks dan dinamis. Strategi ini membuat Kazakhstan lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan internasional tanpa kehilangan jati diri nasionalnya (Hopf, 2002).

1.8 Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwa diterapkannya strategi middle power Kazakhstan dalam pengelolaan hubungan trilateral antara Amerika Serikat dan Rusia ini cukup efektif dalam menjaga relasi terhadap keduanya meskipun hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dapat dibilang tidak cukup baik, dengan adanya konflik yang terjadi seperti konflik Rusia-Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat secara tidak langsung namun Kazakhstan dapat mempertahankan hubungan kerjasama terhadap keduanya dengan bersifat netral. Hal tersebut sesuai dengan Teori middle power dan juga relational power. Karena pada dasarnya dengan strategi itu sendiri menunjukkan keseriusan upaya Kazakhstan dalam mempertahankan hubungan trilateral antara Amerika Serikat dan Rusia.

Penulis berargumen bahwa diterapkannya strategi middle power oleh Kazakhstan dalam pengelolaan hubungan trilateral antara Amerika Serikat dan Rusia merupakan wujud dari diplomasi fleksibel yang efektif. Strategi ini mencerminkan tidak hanya kemampuan untuk menjalin relasi bilateral yang setara, tetapi juga kecermatan dalam membaca dinamika global dan domestik. Pendekatan ini selaras dengan konsep *relational power*, di mana Kazakhstan menjalin relasi bukan karena kekuatan keras, melainkan karena peran strategis dan kepercayaan yang dibangun di antara aktor-aktor global.

Selain itu, pendekatan *Balance of Identity* memperkuat argumen bahwa Kazakhstan aktif dalam membentuk dan menyeimbangkan identitas nasionalnya demi menciptakan stabilitas eksternal dan koherensi internal. Melalui narasi identitas yang netral namun fleksibel, Kazakhstan dapat diterima oleh dua kekuatan besar tanpa kehilangan legitimasi politik. Hal ini menjadikan strategi middle power tidak hanya sebagai pilihan rasional dalam konteks struktur kekuatan dunia, tetapi juga sebagai ekspresi dari dinamika identitas yang strategis dalam hubungan internasional (Abdelal et al., 2006; Hopf, 2002).

Penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan strategi Kazakhstan tidak hanya ditentukan oleh faktor struktur kekuasaan internasional atau intensitas hubungan bilateral, melainkan juga oleh kecakapan negara tersebut dalam mengelola identitas nasional. Konsep *balance of identity* menjelaskan bagaimana Kazakhstan menyusun

narasi yang berbeda tergantung mitra diplomatiknya, tanpa menimbulkan konflik atau kehilangan legitimasi. Pendekatan ini memperkuat efektivitas strategi middle power Kazakhstan sebagai aktor netral yang dapat menjembatani dua kekuatan besar dunia (Tsygankov, 2010; Abdelal et al., 2006).

1.9 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Untuk mencapai hal tersebut. Peneliti berusaha untuk mencari informasi serta data-data terkait menganalisis fenomena tersebut. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat menjelaskan mengenai strategi-strategi dan antisipasi Kazakhstan dalam mempertahankan relasi nya dengan Amerika Serikat dan Rusia.

1.9.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020;9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumaen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian atau biasa disebut lokasi penelitian adalah letak dilakukannya penelitian yang melingkupi elemen pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat dicermati dan yang menggambarkan situasi sosial (Nasution, 2003). Situs penelitian adalah Strategi Middle Power di Kazakhstan secara institusi pemerintahan dan kebijakan luar negeri yang diterapkan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan (Sugiyono, 2015). Informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2015). Dalam konteks penelitian ini subjek penelitian adalah Strategi Middle Power Kazakhstan dalam pengelolaan hubungan trilateral antara Amerika Serikat dan Rusia, dan konsep Middle Power.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan secara tidak langsung, biasanya mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan, diproses, ataupun telah diterbitkan oleh orang lain (Hasan, 2024). Jenis data seperti ini memberikan kemudahan bagi para peneliti karena memberikan alternatif yang bisa memberikan penghematan biaya dan efisiensi untuk mengumpulkan data-data baru.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data merujuk pada elemen yang menyediakan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2015). Penelitian ini akan mengambil data dari sumber-sumber yang dikumpulkan secara tidak langsung. Sumber-sumber ini, seperti publikasi pemerintah, jurnal akademik, buku, artikel, media massa, serta studi pustaka.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini kan menggunakan teknik reduksi data. Reduksi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyederhanakan, memfokuskan, dan memurnikan data yang dikumpulkan untuk menghasilkan data yang lebih mudah dipahami dan dianalisis (Miles & Huberman, 1994). Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan biasanya berlimpah dan kompleks. Reduksi data merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan analisis data, khususnya ketika penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Teknik ini biasanya melibatkan beberapa teknik untuk menyederhanakan atau meringkas data sehingga nantinya lebih mudah untuk dilakukan analisis dan menarik kesimpulan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memadatkan dan mengatur data dari jumlah yang besar ke dalam bentuk yang dapat dikelola serta diinterpretasikan (Bhandari, 2020)).

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, penelitian ini akan menggunakan teknik reduksi data. Menurut Strauss & Corbin (1990), reduksi data dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, membaca dan menelaah data dengan peneliti membaca dan menelaah data secara cermat untuk memahami maknanya. Kedua, mengidentifikasi tema dan kategori dengan peneliti mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul dari data. Ketiga, membuat kode dimana peneliti membuat kode untuk setiap tema dan kategori. Keempat, mengelompokkan data dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan kode yang telah dibuat. Kelima, mereduksi data dimana peneliti mereduksi data dengan menyederhanakan, memfokuskan, dan memurnikan data yang telah dikelompokkan.

1.9.7.1 Kualitas Data

Penggunaan data sekunder dalam penelitian harus selalu memastikan kualitas, validitas, dan reliabilitas temuan penelitian. Cara untuk memastikan bahwa data yang didapat berkualitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kualitas data diukur dengan beberapa kriteria. Pertama *credibility*, data yang kredibel adalah data yang dapat dipercaya dan meyakinkan. Kredibilitas data dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti triangulasi data, member checking, dan auditabilitas. (Guba & Lincoln, 1989). Kedua *transferability*, data yang transferable adalah data yang dapat diterapkan pada konteks lain. Transferabilitas data dapat dicapai dengan memberikan deskripsi yang kaya dan mendalam tentang penelitian dan konteksnya. (Merriam, 1988). Ketiga,

dependability, data yang andal adalah data yang dapat diulang dan menghasilkan temuan yang sama jika penelitian dilakukan lagi dengan cara yang sama. Keandalan data dapat dicapai dengan mendokumentasikan proses penelitian secara detail dan sistematis. (Creswell & Creswell, 2018)